



PENETAPAN

Nomor 33/Pdt.P/2020/PA.Pare

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Citra Dewi binti Marsuki, tempat dan tanggal lahir Sengkang 10 Januari 1983 (umur 37 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Penjual Pakaian Jadi, tempat kediaman Jalan BTN Agus Salim N0.180, xxx xxx, xxxxxx, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Bacukiki Barat, xxxx xxxxxxxx. Selanjutnya disebut **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare pada tanggal 19 Februari 2020 dengan register perkara Nomor 33/Pdt.P/2020/PA. Pare, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Citra Dewi binti Marsuki telah menikah dengan almarhum H. Hermansyah bin H. Djalaluddin selanjutnya Buku Kutipan Akta Nikah nomor : 332/22/IX/2002, tertanggal 2 September 2002;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir dua orang anak bernama :
 - a. Ryan Adinata Hermansyah bin H. Hermansyah, umur 16 tahun (masih di bawah umur).
 - b. Nur Amira Hafisah Hermansyah binti H. Hermansyah, umur 11 tahun (masih dibawah umur).

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa H. Hermansyah bin H. Djalaluddin telah meninggal dunia pada Hari Minggu tanggal 28 November 2010 dalam keadaan Islam karena sakit sesuai dengan surat Keterangan Kematian dari Lurah Kampung Baru, Kecamatan Bacukiki Barat dengan Nomor : 479/53/KLKB/12/2010.

4. Bahwa pada saat meninggal dunia meninggalkan ahli waris :

- a. Citra Dewi binti Marsuki (Istri)
- b. Ryan Adinata Hermansyah bin H. Hermansyah.
- c. Nur Amira Hafisah Hermansyah binti H. Hermansyah.

5. Bahwa H. Hermansyah bin H. Djalaluddin memiliki tanah berdasarkan Akta Jual Beli :

- a. Akta Jual Beli No. 409/594.4/V/2008
- b. Akta Jual Beli No. 4/VIII/2008.

6. Bahwa tanah tersebut akan dijual oleh Pemohon (Citra Dewi binti Marsuki) namun pihak Notaris tidak mau dikarenakan masih ada ahli warisnya yang belum cukup umur namun disyaratkan untuk Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama.

7. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris melalui Pengadilan Agama Parepare dengan maksud :

Untuk ditetapkan, Citra Dewi binti Marsuki (Pemohon), Ryan Adinata Hermansyah bin H. Hermansyah, dan Nur Amira Hafisah Hermansyah binti H. Hermansyah, sebagai ahli waris almarhum H. Hermansyah bin H. Djalaluddin, untuk dijual tanah tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Parepare melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Citra Dewi binti Marsuki (Pemohon), Ryan Adinata Hermansyah bin H. Hermansyah, dan Nur Amira Hafisah Hermansyah binti H. Hermansyah, sebagai ahli waris almarhum H. Hermansyah bin H. Djalaluddin
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan agama Parepare berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Bukti Surat:

1. Fotokopi Akta Nikah atas nama Anas dan Sahra Nomor 213/13/XII/2002 yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, tertanggal 24 Desember 2002 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermeterai cukup, di stempel Pos dan di paraf oleh ketua majelis diberi kode P.1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anas, A Nomor 7372020209800005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Parepare tanggal 4 April 2013, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermaterai cukup distempel pos dan di paraf oleh Ketua Majelis diberi kode P.2.
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sahrah Nomor 7372025304830004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Parepare tanggal 4 April 2013, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermaterai cukup distempel pos dan di paraf oleh Ketua Majelis diberi kode P.3.
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Anas, A Nomor 7372022808140006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Parepare tanggal 22 Desember 2014, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermaterai cukup distempel pos dan di paraf oleh Ketua Majelis diberi kode P.4.
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sugiratu Anas, Nomor 38/AK/SINTAP/III/2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Catatan Sipil, xxxx xxxxxxxx tertanggal 12 Nopember 2003, bermaterai cukup distempel pos dan dicocokkan dengan aslinya dan dinyatakan sesuai serta bermeterai cukup, di stempel Pos dan di paraf oleh ketua majelis dan diberi kode P.5.

6. Asli Silsilah Keluarga Anas. A tertanggal 27 Desember 2019 yang dikeluarkan Kepala Kelurahan Mallusetasi, bermaterai cukup, di stempel Pos dan di paraf oleh ketua majelis dan diberi kode P.6.
7. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Anas, A yang dibuat oleh Anas.A tanggal 27 Desember 2019, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermaterai cukup distempel pos dan di paraf oleh Ketua Majelis diberi kode P.7.
8. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 200 An. Sugiratu Anas yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional xxxx xxxxxxxx tertanggal 12 April 2006, telah dibubuhi meterai cukup dan distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi kode P.8.

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Nurhayati binti M. Arsyad D**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Nenas Nomor 6 RT 001 RW 003 Kelurahan Tiro Sompe, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersepupu dengan Pemohon sedang suaminya bernama H. Hermansyah bin H. Djalaluddin;
- Bahwa Pemohon dengan suaminya almathum dikaruniai 2 orang anak yaitu Rya Adinata Hermansyah bin H. Hermansyah, umur 16 tahun dan Nur Amira Hafisa binti H. Hermansyah, umur 11 tahun;
- Bahwa saksi tahu Pemohon ke Pengadilan untuk mengurus perwalian karena terdapat tanah mau dijual harus ada perwalian dari pengadilan karena kedua anak Pemohon masih di bawah umur;
- Bahwa tanah tersebut atas nama alamarhum H. Hermansyah bin H. Djalaluddin berupa Akta Jual Beli;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu maksud perwalian tersebut untuk mengurus administrasi di Notaris sehubungan penjualan tanah tersebut;

Saksi 2, **Parenrengi bin Paturusi**, umur 59. tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan Polri, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Nenas Nomor 6 RT 001 RW 003 Kelurahan Tiro Sompe, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersepupu dengan Pemohon sedang suaminya bernama H. Hermansyah bin H. Djalaluddin;
- Bahwa Pemohon dengan almarhum suaminya dikaruniai 2 orang anak yaitu Ryan Adinata Hermansyah bin H. Hermansyah, umur 16 tahun dan Nur Amira Hafisa binti H. Hermansyah, umur 11 tahun;
- Bahwa saksi tahu Pemohon ke Pengadilan untuk mengurus perwalian karena ada tanah peninggalan almarhum suami Pemohon mau dijual harus mendapat perwalian dari pengadilan karena kedua anak almarhum masih di bawah umur;
- Bahwa tanah tersebut dibeli berdasarkan Akta Jual Beli atas nama suami Pemohon almarhum H. Hermansyah bin H. Djalaluddin;
- Bahwa saksi tahu maksud perwalian tersebut semata-mata untuk mengurus administrasi di Notaris sehubungan tanah tersebut akan dijual sehingga diperlukan adanya penetapan perwalian dari anak Pemohon kepada Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama H. Hermansyah bin H. Djalaluddin, sebagaimana dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 332/22/IX/2002 tanggal 2 September 2002 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama : Ryan Adinata Hermansyah bin H. Hermansyah, umur 16 tahun dan Nur Amira Hafizah Hermansyah binti H. Hermansyah, umur 11 tahun, bahwa kepentingan perwalian ini adalah untuk kepentingan menjual tanah peninggalan almarhum H. Hermansyah berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 706/594.4/VIII/2008 (posita angka 5 buruf (b), karena kedua anak Pemohon masih di bawah umur dan belum cakap bertindak menurut hukum, maka Pemohon bermaksud ditunjuk sebagai wali untuk pengurusan tanah peninggalan almarhum H. Hermansyah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.8 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Anas bin Arifin (Pemohon) dan Sahra alias Sahrah bin M. Yunus (isteri Pemohon) keduanya sebagai suami isteri, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon adalah suami isteri sah dari perempuan bernama Sahra alias Sahrah binti M. Yunus, menikah pada tanggal 15 Desember 2002, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anas A dan bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sahrah dan bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Anas A, menunjukkan bahwa benar Pemohon dan isterinya atas nama Sahrah dan anak atas nama Sugiratu Anas, adalah anggota keluarga dari

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2020/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon, isteri dan anaknya tersebut telah diakui secara administrasi Kependudukan sebagai suami isteri yang hidup dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sugiratu Anas, menunjukkan bahwa benar anak Pemohon baru berumur 15 tahun, adalah anak kandung dari Pemohon dengan isteri Pemohon bernama Sahra alias Sahra binti M. Yunus, belum cakap untuk bertindak dimuka hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Asli Silsilah Keluarga atas nama Anas A dan Sahra, menunjukkan bahwa Anas A dan Sahra, adalah suami isteri sah dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing Sugiratu Anas anak I, Ratun Intan Anas anak ke II dan Zalsabila anak ke III, ketiganya adalah anak kandung Pemohon dengan isterinya Sahra alias Sahra binti M. Yunus;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Asli Surat Pernyataan menerangkan bahwa Pemohon Anas A, sebagai suami, Sahrah, sebagai isteri, Sugiratu Anas, sebagai anak kandung, Ratu Intan Anas sebagai anak kandung dan Zalsabila Anas sebagai anak kandung, menyatakan bahwa surat pernyataan tersebut dibuat dan ditandatangani tanpa paksaan dari siapa pun untuk kelengkapan berkas administrasi di Pengadilan Agama Parepare;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1146 atas nama Sugiratu Anas, berdasarkan Hibah dengan Akta PPAT. Habibah Abubakar, S.H., tanggal 8 Maret 2006 Nomor 134/Kec. Bacukiki/III/2006, harus dinyatakan bahwa sertifikat tersebut atas nama anak Pemohon bernama Sugiratu Anas binti H. Anas A;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Nurhayati binti M. Arsyad D dan Parenrengi bin Paturusi, kedua saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2020/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut bersama-sama dengan bukti tertulis tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, setelah dianalisis Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian karena anaknya masih di bawah umur atas bernama Ryan Adinata Hermansyah bin H. Hermansyah, umur 16 tahun dan Nur Amira Hafizs binti H. Hermansyah, umur 11 tahun;
- Bahwa Anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan suaminya almarhum bernama H. Hermansyah bin H. Djalaluddin meninggal dunia pada tanggal
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menjual tanah peninggalan almarhum H. Hermansyah bin H. Djalaluddin dengan Akta Jual Beli Nomor 706/594.4/VIII/2008 (posita angka 5 buruf b);
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini semata-mata untuk kepentingan penjualan tanah tersebut;
- Bahwa pada saat penetapan ini diajukan ayah kandung almarhum Hermansyah masih hidup bernama H. Djalaluddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50 Pasal 51 dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107 dan Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas anak bernama Ryan Adinata Hermansyah bin H. Hermansyah dan Amira Hafisa binti H. Hermansyah, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut pada Notaris;

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan secara hukum Pemohon (**PEMOHON**) sebagai wali dari anak yang bernama **Ryan Adinata Hermansyah bin H. Hermansyah**, umur 16 tahun dan **Nur Amira Hafisa binti H. Hermansyah**, umur 11 tahun;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1441 Hijriah oleh kami **Dra. Satrianih, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.** dan **Muh. Nasir. B, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis di damping para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu **Jisman, S. Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.

Dra. Satrianih, M.H.

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2020/PA.Pare



Muh. Nasir. B, S.H

Panitera Pengganti,

Jisman, S.Ag.

Perincian biaya :

- ATK	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	70.000,00
- PNBP	: Rp	50.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	176.000,00

(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.1/Pdt.P/2020/PA.Pare